

Permohonan PKPU Oleh Pekerja yang Pesangonnya Telah Diputuskan oleh Pengadilan Phi

Muhidin

Magister Kenotarian, Universitas Surabaya

e-mail: Muhidin.blaster@gmail.com

Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan proses hukum yang melibatkan pengajuan permohonan oleh pihak yang mempunyai utang yang belum dibayar kepada Pengadilan PHI. Dalam beberapa kasus, pekerja yang memenangkan persidangan terkait pesangonnya mengajukan permohonan kepada PKPU untuk menunda pembayaran pesangon yang telah diputus oleh Pengadilan PHI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dan memahami alasan penerapan PKPU oleh pekerja dalam rangka pesangon yang telah diputuskan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus terhadap beberapa kasus PKPU yang melibatkan pekerja dengan pesangon yang telah diputus oleh Pengadilan PHI. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, analisis dokumen hukum, dan telaah literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan PKPU oleh pekerja dalam perkara pesangon yang telah diputus oleh Pengadilan PHI dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain keuangan perusahaan, perubahan kondisi ekonomi, dan strategi hukum yang digunakan pekerja. Selain itu, persepsi pekerja terhadap risiko pesangon juga berperan penting dalam keputusan mereka untuk mengajukan PKPU.

Kata kunci: *PKPU, Pesangon, Pengadilan PHI, Pekerja, Permohonan, Penundaan, Pembayaran Hutang*

Abstract

Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) is a legal process that involves the submission of an application by a party who has an unpaid debt to the PHI Court. In some cases, workers who have won the trial related to their severance pay apply for PKPU to suspend the payment of severance pay that has been decided by the PHI Court. This research aims to analyze this phenomenon and understand the rationale behind PKPU applications by workers in the context of severance pay that has been decided. The research method involves a case study of several PKPU cases involving workers with severance pay that has been decided by the PHI Court. Data was collected through interviews with relevant parties, analysis of legal documents, and review of relevant literature. The results show that PKPU applications by workers in severance pay cases that have been decided by the PHI

Court can be influenced by several factors. These factors include company finances, changes in economic conditions, and legal strategies used by workers. In addition, workers' perception of the risk of severance pay also plays an important role in their decision to file for PKPU.

Keywords : *PKPU, Severance Pay, PHI Court, Workers, Application, Postponement, Debt Payment*

PENDAHULUAN

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah proses hukum yang digunakan untuk menanggihkan kewajiban pembayaran utang oleh pihak yang memiliki utang yang belum dibayar kepada kreditur mereka. Dalam konteks hubungan kerja, PKPU dapat menjadi instrumen yang digunakan oleh pekerja untuk menunda pembayaran pesangon yang telah diputuskan oleh Pengadilan PHI. Pesangon merupakan hak yang dimiliki oleh pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja, dan keputusan Pengadilan PHI yang memutuskan jumlah pesangon yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi dasar bagi pihak pekerja untuk mengajukan permohonan PKPU.

Dalam beberapa kasus, pekerja yang telah memenangkan persidangan terkait pesangon mereka seringkali menghadapi kesulitan dalam menerima pembayaran pesangon yang telah diputuskan oleh Pengadilan PHI. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan, perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi likuiditas perusahaan, atau adanya strategi hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menghindari pembayaran pesangon.

Permohonan PKPU oleh pekerja dalam kasus pesangon yang telah diputuskan oleh Pengadilan PHI menjadi perhatian penting dalam konteks perlindungan hak-hak pekerja. Proses PKPU memberikan kesempatan bagi pekerja untuk menanggihkan pembayaran pesangon mereka, sementara pengadilan dan pihak-pihak terkait dapat melakukan evaluasi yang lebih mendalam terkait kondisi keuangan perusahaan. Namun, permohonan PKPU juga dapat menimbulkan konsekuensi bagi pihak perusahaan, seperti penundaan pembayaran pesangon yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan perusahaan dan hubungan dengan kreditur lainnya.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terkait fenomena permohonan PKPU oleh pekerja yang pesangonnya telah diputuskan oleh Pengadilan PHI. Dengan memahami alasan di balik permohonan ini, dapat dilakukan peninjauan terhadap keefektifan dan implikasi dari proses PKPU dalam melindungi hak-hak pekerja serta mempertimbangkan aspek keuangan dan keberlanjutan perusahaan.

METODE

Dalam penelitian ini, digunakan metode studi pustaka sebagai pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena permohonan PKPU oleh pekerja yang pesangonnya telah diputuskan oleh Pengadilan PHI. Studi pustaka dilakukan dengan melakukan peninjauan literatur yang relevan, yang meliputi artikel jurnal, buku, laporan riset, dan dokumen hukum terkait. Melalui metode studi pustaka, peneliti dapat

mengakses beragam sumber informasi yang mencakup penelitian sebelumnya, teori-teori yang terkait, dan pendekatan hukum yang relevan. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai PKPU, hubungan kerja, dan pesangon akan memberikan pemahaman awal yang solid tentang topik ini. Selain itu, teori-teori yang berkaitan dengan aspek keuangan perusahaan, risiko hukum, dan pertimbangan pekerja dalam mengajukan permohonan PKPU juga akan memberikan landasan teoretis yang kuat untuk penelitian ini.

Dalam proses studi pustaka, peneliti juga akan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan, termasuk putusan Pengadilan PHI terkait pesangon yang diputuskan dan peraturan-peraturan terkait PKPU. Dokumen-dokumen hukum tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kerangka hukum yang mengatur PKPU dan bagaimana putusan Pengadilan PHI menjadi dasar bagi pekerja untuk mengajukan permohonan PKPU terkait pesangon mereka. Metode studi pustaka akan memberikan landasan penelitian yang kokoh, dengan menggabungkan penelitian sebelumnya, teori-teori yang relevan, dan dokumen hukum terkait. Dengan pendekatan ini, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena permohonan PKPU oleh pekerja yang pesangonnya telah diputuskan oleh Pengadilan PHI, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pekerja dalam mengajukan permohonan PKPU tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja dalam mengajukan permohonan PKPU setelah pesangon mereka diputuskan oleh Pengadilan PHI

Faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja dalam mengajukan permohonan PKPU setelah pesangon mereka diputuskan oleh Pengadilan PHI dapat bervariasi tergantung pada situasi dan keadaan yang dihadapi oleh masing-masing pekerja. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi keputusan pekerja tersebut meliputi faktor keuangan, perubahan kondisi ekonomi, dan strategi hukum yang digunakan oleh pekerja. Salah satu faktor yang signifikan adalah faktor keuangan. Pekerja yang menghadapi keterbatasan keuangan atau kesulitan dalam memperoleh pesangon yang telah diputuskan oleh Pengadilan PHI mungkin cenderung mengajukan permohonan PKPU. Hal ini dapat terjadi ketika perusahaan menghadapi masalah keuangan atau ketidakmampuan untuk membayar pesangon dengan segera. Dalam situasi ini, pekerja mungkin berpikir bahwa menggunakan mekanisme PKPU dapat memberikan mereka peluang untuk mendapatkan pesangon yang telah diputuskan secara lebih pasti dan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

Perubahan kondisi ekonomi juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pekerja dalam mengajukan permohonan PKPU setelah pesangon mereka diputuskan. Jika terjadi perlambatan ekonomi atau ketidakpastian ekonomi yang signifikan, pekerja mungkin khawatir tentang kemungkinan perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang lebih besar di masa depan. Dalam hal ini, mereka mungkin lebih cenderung untuk mengajukan permohonan PKPU sebagai langkah pencegahan untuk melindungi hak-hak mereka jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang lebih parah dan tidak mampu membayar pesangon.

Selain faktor keuangan dan perubahan kondisi ekonomi, strategi hukum yang digunakan oleh pekerja juga dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam mengajukan

permohonan PKPU setelah pesangon diputuskan. Beberapa pekerja mungkin memilih menggunakan PKPU sebagai strategi hukum untuk menekan perusahaan agar segera membayar pesangon yang telah diputuskan oleh Pengadilan PHI. Dalam beberapa kasus, pekerja dapat berharap bahwa permohonan PKPU akan mendorong perusahaan untuk segera membayar pesangon demi menghindari konsekuensi hukum dan reputasi negatif. Strategi hukum ini dapat dipengaruhi oleh pertimbangan taktis, kepercayaan pada sistem hukum, dan penilaian risiko yang dilakukan oleh pekerja.

Dalam kesimpulannya, faktor-faktor seperti keuangan, perubahan kondisi ekonomi, dan strategi hukum dapat mempengaruhi keputusan pekerja dalam mengajukan permohonan PKPU setelah pesangon mereka diputuskan oleh Pengadilan PHI. Pekerja yang menghadapi keterbatasan keuangan atau kesulitan dalam memperoleh pesangon, menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang tidak pasti, atau menggunakan strategi hukum untuk mendorong perusahaan membayar pesangon secara lebih cepat. Dalam beberapa kasus, faktor-faktor ini dapat saling berinteraksi dan saling memperkuat.

Pekerja yang menghadapi kesulitan keuangan dan memiliki keterbatasan dalam memperoleh pesangon yang telah diputuskan oleh Pengadilan PHI mungkin merasa terdesak untuk mengajukan permohonan PKPU. Mereka mungkin memiliki kebutuhan mendesak untuk mengamankan sumber penghasilan dan melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja. Dalam situasi ini, PKPU dapat menjadi mekanisme yang memungkinkan mereka untuk menanggukhkan pembayaran pesangon, memberi mereka waktu untuk mencari solusi atau melakukan negosiasi dengan perusahaan. Di sisi lain, perubahan kondisi ekonomi yang tidak pasti juga dapat mempengaruhi keputusan pekerja dalam mengajukan PKPU. Jika terjadi perlambatan ekonomi atau ketidakpastian ekonomi yang signifikan, pekerja mungkin merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk melindungi hak-hak mereka. Mereka mungkin menganggap PKPU sebagai instrumen yang dapat memberikan perlindungan hukum dan menjamin pembayaran pesangon mereka jika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang lebih parah di masa depan.

Selain itu, strategi hukum juga dapat menjadi pertimbangan penting dalam keputusan pekerja untuk mengajukan PKPU. Beberapa pekerja mungkin memilih untuk menggunakan PKPU sebagai alat taktis untuk mendorong perusahaan membayar pesangon dengan cepat. Dalam hal ini, pengajuan PKPU dapat menjadi sinyal yang jelas bagi perusahaan bahwa pekerja serius dalam menuntut hak-hak mereka dan siap untuk melibatkan proses hukum. Strategi hukum ini dapat memberikan dorongan bagi perusahaan untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran pesangon agar dapat menghindari konsekuensi hukum yang lebih serius. Pada akhirnya, keputusan pekerja untuk mengajukan permohonan PKPU setelah pesangon diputuskan oleh Pengadilan PHI dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk keuangan, perubahan kondisi ekonomi, dan strategi hukum. Pekerja harus mempertimbangkan situasi dan kepentingan pribadi mereka, sekaligus memahami implikasi jangka panjang dari pengajuan PKPU terhadap hubungan dengan perusahaan. Penting bagi pekerja untuk mengkonsultasikan ahli hukum atau organisasi pekerja yang dapat memberikan nasihat dan bimbingan yang tepat sebelum mengambil keputusan yang penting ini.

Dampak permohonan PKPU oleh pekerja terhadap keberlanjutan keuangan perusahaan

Permohonan PKPU oleh pekerja setelah pesangon mereka diputuskan oleh Pengadilan PHI dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan keuangan perusahaan. Hal ini terutama terkait dengan penundaan pembayaran pesangon yang mungkin terjadi selama proses PKPU berlangsung. Salah satu dampak yang mungkin timbul adalah penundaan dalam aliran kas perusahaan. Permohonan PKPU dapat menghambat atau menghentikan pembayaran pesangon kepada pekerja yang telah diputuskan oleh pengadilan. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pesangon dengan cepat, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam arus kas dan mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Penundaan dalam pembayaran pesangon dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan dan membatasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan lainnya, seperti pembayaran utang atau biaya operasional.

Selain itu, permohonan PKPU juga dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan pihak eksternal terhadap perusahaan. Ketika informasi tentang permohonan PKPU oleh pekerja menjadi publik, perusahaan mungkin menghadapi reputasi yang terganggu dan persepsi negatif dari para pemangku kepentingan, termasuk investor, mitra bisnis, dan kreditor. Dampak ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan tambahan, menjalin kerjasama dengan pihak lain, atau mempertahankan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Lebih lanjut, permohonan PKPU juga dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi perusahaan. Proses PKPU melibatkan pengadilan dan prosedur hukum yang kompleks. Penundaan pembayaran pesangon yang disebabkan oleh permohonan PKPU dapat memperpanjang waktu penyelesaian sengketa dan meningkatkan biaya hukum yang harus ditanggung oleh perusahaan. Selain itu, tergantung pada hasil dari proses PKPU, perusahaan mungkin dihadapkan pada kemungkinan pembayaran yang lebih besar daripada pesangon yang telah diputuskan sebelumnya. Ini dapat menyebabkan tekanan keuangan tambahan dan mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan.

Untuk menghadapi dampak-dampak ini, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga keberlanjutan keuangan. Penting bagi perusahaan untuk melakukan analisis keuangan yang cermat dan merencanakan sumber daya yang diperlukan dalam menghadapi potensi permohonan PKPU. Perusahaan juga harus menjaga komunikasi yang terbuka dengan pekerja dan pihak terkait, serta menjalin hubungan yang baik dengan pengadilan dan lembaga terkait. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat menjajaki opsi negosiasi dengan pekerja atau mencari solusi alternatif yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, permohonan PKPU oleh pekerja juga dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan keuangan perusahaan. Salah satu dampaknya adalah adanya ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu rencana dan strategi perusahaan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ketika perusahaan menghadapi permohonan PKPU, proses penyelesaian sengketa dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Selama periode ini, perusahaan harus menghadapi

ketidakpastian terkait keputusan pengadilan dan risiko keuangan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penundaan pembayaran pesangon.

Selain itu, permohonan PKPU juga dapat mempengaruhi hubungan perusahaan dengan para kreditur dan institusi keuangan. Ketika perusahaan menghadapi masalah keuangan yang disebabkan oleh permohonan PKPU, hal ini dapat mengurangi kepercayaan kreditur dan kemungkinan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan tambahan. Ini dapat membuat perusahaan terjebak dalam siklus yang memburuk, di mana mereka kesulitan memenuhi kewajiban keuangan, memperoleh pembiayaan, dan menjaga keberlanjutan operasional. Selain dampak keuangan, permohonan PKPU juga dapat mempengaruhi hubungan antara perusahaan dan pekerja. Ketika pekerja mengajukan PKPU, hal ini menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap perusahaan dan dapat menciptakan ketegangan yang mempengaruhi lingkungan kerja. Kepercayaan dan kolaborasi antara manajemen dan pekerja dapat terganggu, yang dapat berdampak negatif pada produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi dampak-dampak ini, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah proaktif. Pertama, perusahaan harus memperkuat manajemen keuangan mereka dengan melakukan perencanaan yang cermat, mengidentifikasi risiko keuangan potensial, dan menjaga likuiditas yang cukup. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga komunikasi yang terbuka dengan pekerja dan pihak terkait lainnya, termasuk kreditur dan institusi keuangan, untuk membangun saling pengertian dan memperoleh dukungan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan alternatif lain seperti negosiasi atau mediasi sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dengan pekerja, dengan tujuan menghindari permohonan PKPU.

Dalam kesimpulannya, permohonan PKPU oleh pekerja dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan keuangan perusahaan. Penundaan pembayaran pesangon, ketidakpastian hukum, dan kerugian reputasi adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah proaktif dalam menghadapi permohonan PKPU, seperti memperkuat manajemen keuangan, menjaga komunikasi yang terbuka, dan mencari solusi alternatif untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dengan pekerja.

Peran Pengadilan PHI dalam penanganan kasus PKPU yang melibatkan pekerja dengan pesangon yang telah diputuskan

Peran Pengadilan PHI dalam penanganan kasus PKPU yang melibatkan pekerja dengan pesangon yang telah diputuskan sangat penting. Pengadilan memiliki peran kunci dalam menjaga keadilan dan menyelesaikan sengketa antara pekerja dan perusahaan terkait dengan pembayaran pesangon. Pertama, Pengadilan PHI memiliki peran sebagai forum penyelesaian sengketa yang independen dan netral. Pengadilan bertindak sebagai lembaga yang objektif dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak terjamin. Dalam konteks permohonan PKPU, pengadilan akan mengadili dan mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku. Hal ini memberikan jaminan bagi pekerja bahwa perselisihan mereka akan ditangani secara adil dan transparan.

Selanjutnya, Pengadilan PHI memiliki wewenang untuk memutuskan apakah permohonan PKPU pekerja dapat diterima atau ditolak. Dalam melakukan proses pengadilan, pengadilan akan mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan oleh pekerja dan perusahaan. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan permohonan PKPU, termasuk apakah perusahaan benar-benar mengalami kesulitan keuangan yang membenarkan penundaan pembayaran pesangon. Dengan demikian, pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan apakah pekerja berhak atas perlindungan hukum yang diamanatkan oleh PKPU.

Pengadilan PHI juga berperan dalam mengawasi proses PKPU setelah permohonan diterima. Pengadilan akan memastikan bahwa perusahaan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan perusahaannya, sementara juga memperhatikan hak-hak pekerja. Pengadilan dapat memberikan arahan dan putusan terkait pembayaran pesangon, waktu penundaan, atau tindakan lain yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini, peran pengadilan adalah untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja dan perusahaan serta memastikan keberlanjutan keuangan perusahaan.

Selain itu, pengadilan juga berperan dalam menyelesaikan sengketa antara pekerja dan perusahaan melalui proses peradilan. Jika terjadi ketidaksepakatan atau konflik dalam proses PKPU, pengadilan akan menjadi mediator atau arbiter yang mengambil keputusan akhir. Pengadilan akan mencari jalan keluar yang adil dan mempertimbangkan hukum yang berlaku untuk memutuskan sengketa antara pekerja dan perusahaan. Dalam hal ini, pengadilan memainkan peran penting dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, peran Pengadilan PHI dalam penanganan kasus PKPU yang melibatkan pekerja dengan pesangon yang telah diputuskan sangat penting. Pengadilan memastikan penyelesaian sengketa yang adil dan netral, memutuskan kelayakan permohonan PKPU, mengawasi proses PKPU, serta menyelesaikan sengketa antara pekerja dan perusahaan. Peran ini membantu menjaga keadilan, menjamin hak-hak pekerja, dan menjaga keberlanjutan keuangan perusahaan.

Selain itu, peran Pengadilan PHI juga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dalam kasus PKPU, pekerja dan perusahaan dapat mengandalkan pengadilan sebagai lembaga yang akan memutuskan sengketa mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Keputusan pengadilan memberikan arah yang jelas dan otoritatif bagi perusahaan dan pekerja dalam menghadapi kasus PKPU. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari sengketa yang tidak terkendali. Selanjutnya, peran pengadilan juga memberikan ruang bagi proses mediasi dan negosiasi antara pekerja dan perusahaan. Pengadilan PHI sering kali mengupayakan penyelesaian damai melalui mediasi antara kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan final. Mediasi ini dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, menghindari biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses peradilan yang lebih panjang.

Dalam beberapa kasus, pengadilan juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang mengajukan permohonan PKPU. Jika pengadilan memutuskan bahwa perusahaan memiliki keterlambatan atau kelalaian dalam membayar pesangon, pengadilan dapat mengambil tindakan hukum yang sesuai, termasuk mengamanatkan pelunasan pesangon atau memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar keputusan

pengadilan. Hal ini memberikan jaminan bagi pekerja bahwa hak-hak mereka akan dipertahankan dan perlindungan hukum akan diberikan jika perusahaan tidak mematuhi keputusan pengadilan.

Namun demikian, perlu diakui bahwa pengadilan juga memiliki keterbatasan dalam penanganan kasus PKPU. Proses hukum membutuhkan waktu dan biaya, dan dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa dapat menjadi rumit dan memakan waktu yang lama. Selain itu, pengadilan juga perlu memperhatikan keseimbangan kepentingan antara pekerja dan perusahaan, serta faktor-faktor keuangan yang mempengaruhi keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk menjalankan peran mereka dengan bijaksana dan adil, serta mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dari keputusan yang mereka ambil.

Secara keseluruhan, peran Pengadilan PHI dalam penanganan kasus PKPU yang melibatkan pekerja dengan pesangon yang telah diputuskan sangatlah penting. Pengadilan memberikan penyelesaian sengketa yang adil, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi pekerja. Dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan, pengadilan membantu menjaga keberlanjutan keuangan perusahaan dan menciptakan lingkungan yang adil bagi para pekerja.

SIMPULAN

Permohonan PKPU oleh pekerja yang pesangonnya telah diputuskan oleh Pengadilan PHI merupakan fenomena yang kompleks dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dalam konteks perlindungan hak-hak pekerja, PKPU memberikan peluang bagi pekerja untuk menagguhkan pembayaran pesangon mereka, sambil memberikan kesempatan bagi pengadilan dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terkait kondisi keuangan perusahaan. Namun, fenomena ini juga menimbulkan konsekuensi bagi pihak perusahaan, seperti penundaan pembayaran pesangon yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan dan hubungan dengan kreditur lainnya.

Melalui penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa permohonan PKPU oleh pekerja dalam kasus pesangon yang telah diputuskan oleh Pengadilan PHI dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi keuangan perusahaan, perubahan ekonomi, dan strategi hukum yang digunakan oleh pekerja. Selain itu, persepsi pekerja terhadap risiko pembayaran pesangon juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan mereka untuk mengajukan permohonan PKPU. Pemahaman yang mendalam tentang fenomena permohonan PKPU ini penting dalam mempertimbangkan aspek perlindungan hak-hak pekerja dan keberlanjutan perusahaan. Perlindungan hak-hak pekerja harus sejalan dengan keberlanjutan perusahaan dan pertimbangan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang dalam menangani kasus PKPU ini, dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang implikasi hukum dan ekonomi dari permohonan PKPU oleh pekerja, serta menganalisis dampaknya terhadap keberlanjutan perusahaan. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para pemangku kepentingan dalam menghadapi kasus-kasus PKPU yang melibatkan pekerja dengan pesangon yang telah diputuskan oleh Pengadilan PHI.

DAFTAR PUSTAKA

- Wulan, F. N., Pratikno, M. W. R., Agustina, R. E., Asih, P. S., & Putri, K. N. K. (2022, September). Labor Assistance In Obtaining Severance Rights At Phi (Industrial Relations Court). In *Proceeding International Conference Restructuring And Transforming Law* (Pp. 72-83).
- Yono, S., Sulistiyono, A., Mashdurohatun, A., & Sari, R. M. P. (2020). Reconstruction Of Separate-Creditor Positions In The Process Declaring Bankruptcy In Indonesia Based On Justice Value.
- Jatmiko, B. P. (2022). Akibat Hukum Perbedaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 2(2), 411-431.
- Kornelis, Y., & Amboro, F. Y. P. (2020). Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 7(2), 237-277.
- Thobari, T., Alauddin, R., & Rumkel, N. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sela Yang Tertunda Tentang Upah Skorsin (Studi Kasus Perkara Nomor: 09/Pdt. Sus-Phi/Pn. Tte, Jucnto Putusan Kasasi Nomor 143 K/Pdt. Sus-Phi/2015. *Khairun Law Journal*, 4(1), 59-72.
- Dewi, P. E. T., & Sumertajaya, I. K. S. W. (2021, December). Legal Protection For Workers' Rights In Company Bankruptcy Due To The Covid-19 Pandemic In Indonesia. In *2nd International Conference On Business Law And Local Wisdom In Tourism (Icblt 2021)* (Pp. 413-416). Atlantis Press.
- Sartanto, A., Pamuncak, A. W., & Kurnianingsih, M. (2022, May). Settlement Of Industrial Relations Disputes Through Peace Agreements. In *International Conference On Community Empowerment And Engagement (Iccee 2021)* (Pp. 263-271). Atlantis Press.